

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Bencana alam gempa bumi adalah fenomena yang tidak dapat dihindari, usaha yang dapat dilakukan adalah mencegah terjadinya korban jiwa dalam jumlah besar dan ini merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat dan pemerintah (Davis, 2006; 4). Gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia menelan korban jiwa akibat runtuhnya bangunan pada saat terjadi gempa. Runtuhnya bangunan saat terjadi gempa akan menimpa orang yang berada di dalamnya sehingga dapat menimbulkan luka-luka bahkan kematian. Gempa bumi DIY tanggal 27 Mei 2006 yang berlangsung di pagi hari selama lebih dari satu menit menelan korban banyak korban jiwa. Jumlah korban di DIY dan Jateng berdasarkan data dari Media Center adalah 5.743 orang meninggal dan 38.423 orang luka-luka. Korban luka-luka dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di DIY dan Jateng. Akibat gempa tersebut, 126.932 keluarga kehilangan rumah, 183.399 keluarga rumahnya rusak berat, dan 259.816 keluarga rumahnya rusak ringan. Sedangkan di Gunung Kidul, jumlah korban meninggal 81 orang dan 1,086 orang luka-luka. Kerusakan rumah penduduk di Gunung Kidul 7,746 rata tanah, 10,670 rusak berat, 27,130 rusak ringan (Haifani, 2006; 3).

Daerah yang tertimpa musibah, membutuhkan waktu yang lama dalam pemulihan kondisi seperti semula. Daerah bencana tidak bisa bangkit tanpa bantuan dari pihak luar. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah ataupun LSM

berperan penting dalam pemulihan kondisi setempat pasca gempa. Salah satu daerah yang tertimpa musibah bencana alam pada tahun 2006 silam ini adalah Dusun Kedung Banteng, Desa Sengon Kerep, Gunung Kidul. Tim Syallom mengadopsi Dusun Kedung Banteng, Desa Sengon Kerep sebagai daerah sasaran untuk digerakkannya pemberdayaan masyarakat, karena Dusun Kedung Banteng adalah daerah terabaikan yang tidak dikenal masyarakat luas dan belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak luar. Sengon Kerep merupakan daerah yang tidak banyak diketahui orang karena tidak ada sesuatu yang khusus di Sengon Kerep. Masyarakat Kedung Banteng sangat tergantung pada program pemerintah dengan dana terbatas dan tidak ada program khusus pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan. Melihat kondisi yang menimpa korban-korban bencana alam ini, Yayasan Gloria Graha tergerak untuk memberikan bantuan kepada sesamanya.

Pembentukan tim, menurut McGill (1982) dalam Munandar (2001; 260), merupakan suatu proses diagnosis dan peningkatan efektivitas suatu kelompok kerja dengan perhatian khusus terhadap prosedur kerja dan hubungan antar pribadi di dalamnya. Teknik pembentukan tim memperhatikan prosedur tugas kelompok maupun proses-proses manusia yang dihadapinya. Intervensi dengan menggunakan teknik pembentukan tim pada umumnya berupaya untuk memperkuat identifikasi diri anggota tim dengan kelompok kerjanya, membantu kelompok untuk belajar berfungsi secara lebih efektif, dan meningkatkan keterpaduan antara kelompok kerja yang ada dalam keseluruhan organisasi (Siegel & Lane (1987) dalam Munandar, 2001; 260).

LSM ataupun kelompok pelayanan sosial harus menjaga agar program-program pemulihan paska bencana tidak menimbulkan ketergantungan. Walaupun pada awalnya orang yang terkena bencana mungkin harus diperlakukan sebagai korban, jarang sekali orang-orang sebagai korban ini kehilangan kemampuan sampai sama sekali tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan sendiri. Program-program darurat cenderung membuat masyarakat korban tergantung pada bantuan luar, setidaknya pada masa-masa awal paska bencana. Ketergantungan ini tidak dapat dipertahankan lama, oleh karenanya LSM harus menetapkan batas waktu pemberian bantuan. Masalah ini sering kali dianggap terlalu peka untuk dibicarakan dengan para korban yang tengah mengalami penderitaan, tetapi pengalaman membuktikan bahwa keinginan untuk bangkit dan menjadi mandiri kembali biasanya sangat kuat. Penting bagi pelaksana proyek untuk mengenali dan memberdayakan potensi yang ada pada masyarakat dan untuk memanfaatkan ketrampilan dan sumber daya yang masih tersisa. Pemanfaatan tenaga kerja dan sumber daya setempat akan membawa dampak yang besar pada upaya membangun kembali ekonomi masyarakat dari sejak awal pelaksanaan program.

Kehadiran LSM dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang masih timpang dan tidak adil (Beard, 2002; 15-25). Pemberdayaan masyarakat di Indonesia mengalami fenomena unik berupa keterlibatan LSM yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, program yang dilaksanakan secara *top down* merupakan bentuk pemberdayaan yang tidak sesuai dengan bentuk pemberdayaan masyarakat sesuai teori yang berkembang saat ini

(Beard, 2002; 15-25). Beard (2003; 13-35) menyatakan keterlibatan LSM menimbulkan ketergantungan relatif tinggi masyarakat yang dibantu terhadap LSM pelaksana pemberdayaan masyarakat. Penulis mempertahankan konsep pemikiran Beard yang mengambil dari segi teori pemberdayaan masyarakat secara *top down*. Mengenai LSM yang disebutkan oleh Beard, sebagaimana yang penulis lihat konteks LSM tersebut adalah Tim Syallom sebagai kelompok misi pelayanan sosial sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap LSM salah satu faktor penyebabnya adalah jaringan kerja, kepercayaan masyarakat terhadap program yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber dana yang dimiliki oleh LSM dan masyarakat penerima bantuan mengasumsikan bahwa program LSM adalah tepat karena memiliki rencana analisis dan tujuan terarah (Smith, 2008; 19-38).

Kebutuhan dan kapasitas warga yang tertimpa bencana harus menjadi prioritas utama dalam merancang proyek, tetapi hal ini hanya dapat dipahami bila pengelola proyek memiliki pemahaman menyeluruh akan situasi paska bencana dan dinamikanya. Pemahaman akan situasi paska bencana akan membantu menempatkan proyek pada konteks pembangunan jangka panjang yang lebih luas dan rehabilitasi daerah bersangkutan. Penyusunan program yang operasional adalah sebuah metode perancangan program yang dapat mengatasi masalah masalah ini. Penyusunan program ini menekankan pemberdayaan rancangan proyek dalam kerangka strategi besar program paska bencana. Dengan metode ini, hambatan-hambatan yang akan terjadi dapat diatasi (Davis, 2006; 10-11).

Dari kesekian banyak persoalan yang timbul selama *internship*, persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam adalah tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Tim Syallom beserta hambatannya selama pelaksanaan program pemberdayaan di Dusun Kedung Banteng, Desa Sengon Kerep. Penulis melihat program pemberdayaan masyarakat terhadap korban bencana alam gempa bumi di Dusun Kedung Banteng, Desa Sengon Kerep, Gunung Kidul oleh Yayasan Gloria memiliki peran penting terhadap masyarakat di Sengon Kerep, Gunung Kidul.

I. 2. Perumusan Masalah

Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini berusaha menganalisa permasalahan-permasalahan hidup yang dialami masyarakat di Dusun Kedung Banteng, Desa Sengon Kerep, Gunung Kidul. Berdasarkan kondisi lapangan dari masyarakat Dusun Kedung Banteng, Sengon Kerep, Gunung Kidul dan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Tim Syalom, ditemukan pertanyaan yang berhubungan dalam penulisan KTI ini:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat korban gempa bumi yang dilakukan Tim Syallom Yayasan Gloria Graha di tahun 2006-2009 terhadap masyarakat Dusun Kedung Banteng, Desa Sengon Kerep, Gunung Kidul?
2. Apa sajakah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada masyarakat Dusun Kedung Banteng, Desa Sengon Kerep, Gunung Kidul oleh Tim Syallom selama tahun 2006-2009?

I. 3. Tujuan Penelitian

Pemahaman manusia terhadap lingkungan akan terwujud dari perilaku sehari-hari, demikian juga dengan tindakan yang diambil oleh Tim Syallom dan masyarakat binaannya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini, diperlukan sarana yang tepat serta tenaga yang cukup terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan pemberdayaan yang dilakukan masyarakat korban gempa bumi di Dusun Kedung Banteng, Desa Sengon Kerep, Gunung Kidul oleh Tim Syallom selama tahun 2006-2009.
2. Mengenali hambatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat korban gempa bumi di Dusun Kedung Banteng, Desa Sengon Kerep, Gunung Kidul oleh Tim Syallom selama tahun 2006-2009.

I. 4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat mempunyai beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh beberapa belah pihak. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, seperti:

1. Bagi Yayasan Gloria, memberikan informasi sebagai bahan rujukan program yang sejenis yang tepat guna dan tepat sasaran.
2. Bagi akademisi, sebagai referensi ilmiah penelitian sejenis.
3. Bagi penulis, mengetahui bagaimana menyusun program pemberdayaan masyarakat dan monitoring yang baik dan tepat sasaran.

I. 5. Kerangka Konsep

I. 5. 1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Chambers (1995) dalam Kartasasmita (1996; 13) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “*people-centered*”, *participatory*, *empowering*, and *sustainable*. Untuk menghindari bias pemberdayaan, maka program pemberdayaan dilakukan melalui tahap perencanaan (identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah, dan disain program), pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta menikmati hasil. Menurut Robert Chambers salah satu metode yang dianggap cukup efektif untuk mendisain program bersama adalah metode PRA (Participatory Rural Appraisal). Konsepsi dasar pandangan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) (Chambers, 1996; 19-35) adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan.

Kartasasmita (1996; 11) mengemukakan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Selaras dengan pendapat tersebut, Jim Ife (1995) mengemukakan bahwa “*empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skill to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and effect of their community*”. Akhirnya Kartasasmita (1996; 11-12) menyimpulkan bahwa, upaya yang amat pokok dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan taraf

pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti: modal, teknologi, informasi, dan pasar.

Pemberdayaan masyarakat menurut Karsidi (2005; 8) harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

Pertama, upaya itu harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih

maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.

Dalam program pemberdayaan masyarakat, masyarakat sebagai sasaran memiliki kedudukan yang sangat strategis. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek kegiatan yang hanya akan menerima hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat, melainkan sebagai pihak yang harus turut menentukan dalam kegiatan tersebut. Terlebih lagi dengan adanya paradigma yang baru, yaitu *people-centered development*. Masyarakat bersama-sama dengan pelaksana perubahan menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam perubahan kehidupan masyarakat secara kolektif dan masyarakat harus berjuang untuk perubahannya sendiri secara kolektif (Beard, 2003; 13-25; Schiele dkk, 2008; 21-38). Frankenberg (2009; 16-30) menyatakan masyarakat miskin Indonesia memiliki keterlibatan tinggi dalam organisasi atau kelompok sosial dan kegiatannya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat secara *bottom up* (Karsidi, 1988 dalam Karsidi, 2005; 5), sebagai berikut:

1. Belajar Dari Masyarakat,
Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.
2. Pendamping sebagai Fasilitator,
Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan

mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3. Saling Belajar,

Saling Berbagi Pengalaman, Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan lokal (bahkan tradisional) masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga dapat memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, pengetahuan modern dan inovasi dari luar malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan lokal masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling melengkapi satu sama lainnya.

Kesejahteraan dan realisasi diri manusia merupakan jantung konsep pembangunan yang memihak rakyat dan pemberdayaan masyarakat (Karsidi, 2005; 3). Perasaan berharga diri yang diturunkan dari keikutsertaan dalam kegiatan proyek pemberdayaan masyarakat adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi dengan keikutsertaan dalam konsumsi produk-produknya. Keefisienan sistem pemberdayaan masyarakat, karenanya haruslah tidak semata-mata dinilai berdasar produk-produknya, melainkan juga berdasar mutu kerja sebagai sumber penghidupan yang disediakan bagi para pesertanya, dan berdasar kemampuannya menyertakan segenap anggota masyarakat (Karsidi, 2005; 5-6). Paradigma pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat mengandung arti penting bagi penciptaan masa depan yang lebih manusiawi. Pemahaman akan paradigma itu penting artinya bagi pemilihan teknik sosial termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang mementingkan rakyat (Karsidi, 2005; 7).

Schiele dkk (2008; 21-38) menyatakan pemberdayaan masyarakat memiliki aspek kebersamaan dan usaha bersama-sama mengatasi masalah yang dihadapi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat (Karsidi, 2005; 8). Menurut Sikhondze (1999) dalam Karsidi (2005; 4), orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai *outsider people* dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Dengan demikian peranserta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat dominan.

Lerner dkk (2005) dalam Karsidi (2005; 9) menyatakan warga usia produktif memiliki kontribusi dominan terhadap program pemberdayaan masyarakat dengan motivasi dominan membantu dirinya sendiri untuk keluar dari permasalahan ekonomi yang dihadapinya.

I. 5. 2. Bencana Alam

Secara geografis Indonesia terletak di daerah katulistiwa dengan morfologi yang beragam dari daratan sampai pegunungan tinggi. Keragaman morfologi ini banyak dipengaruhi oleh faktor geologi terutama dengan adanya aktivitas pergerakan lempeng tektonik aktif di sekitar perairan Indonesia diantaranya

adalah lempeng Eurasia, Australia dan lempeng Dasar Samudera Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng tektonik tersebut menyebabkan terbentuknya jalur gempa bumi, rangkaian gunung api aktif serta patahan-patahan geologi yang merupakan zona rawan bencana gempa bumi dan tanah longsor. Bencana (*disaster*), menurut International Strategy for Disaster Reduction (ISDR dalam Hakim, 2007; 14) didefinisikan sebagai *“a serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources”*. Bencana tersebut muncul akibat adanya resiko (*risk*) yaitu *“the probability of harmful consequences, or expected losses (deaths, injuries, property, livelihoods, economic activity disrupted or environment damaged) resulting from interactions between natural or human-induced hazards and vulnerable conditions”*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti yaitu: sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian atau penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuh batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas gunung api dan runtuh batuan relatif kecil sehingga kita akan memusatkan perhatian pada gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif. Wiliyandi (2007; 16) menyatakan gempa bumi disebabkan oleh adanya pelepasan energi regangan elastis batuan pada

litosfir, semakin besar energi yang dilepas semakin kuat atau asal mula gempa yaitu pergeseran sesar dan teori kekenyalan elastis.

Berikut ini beberapa data kejadian gempa bumi besar di dunia sejak tahun 2000 dalam eka-citta buletin Kamadhis UGM (2007; 17):

- 27 Mei 2006. Gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 kurang lebih pukul 05.55 WIB selama 57 detik. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada skala Richter. United States Geological Survey melaporkan 6,2 pada skala Richter; lebih dari 6.000 orang tewas, dan lebih dari 300.000 keluarga kehilangan tempat tinggal.
- 8 Oktober 2005. Gempa bumi besar berkekuatan 7,6 skala Richter di Asia Selatan, berpusat di Kashmir, Pakistan; lebih dari 1.500 orang tewas.
- 26 Desember 2004. Gempa bumi dahsyat berkekuatan 9,3 skala Richter mengguncang Aceh dan Sumatera Utara sekaligus menimbulkan gelombang tsunami di samudera Hindia.
- 26 Desember 2003. Gempa bumi kuat di Bam, barat daya Iran berukuran 6.5 pada skala Richter dan menyebabkan lebih dari 41.000 orang tewas.
- 21 Mei 2002. Di utara Afghanistan, berukuran 5,8 pada skala Richter dan menyebabkan lebih dari 1.000 orang mati.
- 26 Januari 2001. India, berukuran 7,9 pada skala Richter dan menewaskan 2.500 ada juga yang mengatakan jumlah korban mencapai 13.000 orang.

I. 5. 3. Hal Penting dalam Menyusun Program Paska Bencana

Ford dalam Haifani (2008; 3-6) menyatakan bahwa dalam sejarah perjalanan LSM pada umumnya tidak bersifat statis, namun selalu mengalami perubahan-perubahan pendekatan, bahkan visi dan misi pelayanannya dalam penanganan berbagai isu dengan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang menjadi mitra. Permasalahan kemiskinan akan teratasi apabila kualitas sumber daya manusia dan didukung dengan potensi sumber daya alam. Kualitas sumber daya manusia akan mampu mendorong dan mengontrol pengambil keputusan pada seluruh tingkatan untuk terjadinya perubahan sistem pembangunan yang lebih adil.

Menurut Davis (2006; 11-14), ada beberapa hal penting dalam menyusun program paska bencana:

1. Lebih dari sekedar rumah
Dalam situasi paska bencana ada kecenderungan untuk terfokus pada biaya-biaya yang nyata dan solusi yang konkrit. Menghitung jumlah rumah yang hancur dan menyiapkan naungan sementara bagi banyak keluarga kelihatan sebagai langkah awal yang logis yang perlu diambil dalam menghadapi situasi paska bencana. Akan tetapi, ada banyak masalah tak tampak yang harus diatasi berkaitan dengan penyediaan naungan sementara. Proses rekonstruksi membawa pengaruh psikologis yang kuat bagi penduduk dan itu tidak boleh diremehkan. Jadi, program harus dirancang dengan mempertimbangkan semua faktor, langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada masyarakat yang tertimpa bencana.
2. Semua masalah saling berkaitan
Penanganan satu bidang saja secara terpisah dari lainnya tidak akan berhasil. Menangani masalah ketimpangan ekonomi semata, misalkan saja tanpa memperluas akses untuk berpartisipasi dalam politik, atau mencoba mendidik orang untuk mengubah pandangan atas identitas diri mereka tanpa berupaya mengubah ketimpangan mendasar antar berbagai macam faktor yang terlibat.
3. Rehabilitasi menyelamatkan mata pencaharian
Penelitian menunjukkan bahwa korban bencana kebanyakan menganggap tanah, pekerjaan, infrastruktur dan akses terhadap rekonstruksi sebagai prioritas utama mereka. Jadi kebutuhan yang diidentifikasi oleh warga masyarakat sendiri mengarah pada strategi pembangunan jangka panjang dan upaya meningkatkan kapasitas mereka untuk terlibat dalam rehabilitasi paska bencana. Peningkatan kemampuan masyarakat dengan melibatkan warga yang tertimpa bencana dalam rehabilitasi jangka panjang harus menjadi prinsip utama dalam program rekonstruksi paska bencana.

4. Bencana = peluang

Dalam situasi trauma setelah bencana alam, wajar bila perhatian terfokus pada kerugian yang timbul dan kita mengabaikan peluang yang muncul dari situasi krisis. Krisis dapat mempertemukan kelompok-kelompok yang sebelumnya saling bertikai. Krisis dapat membuka peluang bagi kaum perempuan atau kelompok minoritas untuk berperan dalam masyarakat, sesuatu yang sebelumnya terbatas bagi mereka. Krisis juga dapat menyadarkan warga masyarakat untuk menyusun langkah-langkah untuk mencegah bencana di masa depan.

5. Membangun kapasitas dan bukan ketergantungan

Masalah ketergantungan menjadi persoalan dalam situasi paska bencana. Banyak program yang masuk ke suatu daerah selepas bencana membawa sumber daya (dana dan keahlian) yang perlu bagi tahap bantuan darurat, akan tetapi begitu kebutuhan mendesak berlalu, hilang pula keahlian atau dana tersebut. Hal ini menciptakan ketergantungan masyarakat yang tertimpa bencana terhadap proyek-proyek bantuan dan bukannya membantu membangun kapasitas masyarakat agar dapat hidup mandiri. Oleh karena itu, program apapun yang akan dilaksanakan harus mampu membangun kapasitas, baik demi keberlanjutan program tersebut sendiri maupun demi pemulihan serta pembangunan jangka panjang bagi warga yang menjadi korban.

6. Proyek harus terpusat pada evaluasi

Keberhasilan atau kegagalan proyek perlu dievaluasi dengan cermat karena seringkali proyek tidak hanya kurang menghasilkan dampak positif tetapi sebaliknya malah menimbulkan dampak negatif. Misalkan saja, aliran uang dalam jumlah besar melalui sebuah proyek bantuan dapat merusak harga dan kondisi kehidupan masyarakat setempat serta mempengaruhi daya dinamis warga. Dalam situasi paska konflik hal ini dapat menjadi lebih serius karena upaya penyaluran bantuan secara tidak sengaja dapat berkontribusi pada berlanjutnya kekerasan. Kita harus menyadari bahwa proyek yang gagal mencapai hasil positif belum tentu menimbulkan dampak yang netral. Maka, kita perlu member perhatian yang serius terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan proyek. Tanpa adanya mekanisme evaluasi yang terbangun di dalamnya, proyek tidak dapat belajar dari kesalahan masa lalu atau menentukan dengan tepat letak kekeliruan mereka. Evaluasi dapat membantu mencegah masalah program dan mengembalikan proyek ke arah yang benar jika pelaksanaannya telah keluar jalur. Evaluasi penting dalam setiap tahap siklus proyek untuk menjamin agar proyek tetap relevan dan menghasilkan dampak yang diinginkan serta membantu menentukan apakah proyek menghasilkan perubahan yang diinginkan.

Korban jiwa dapat diminimalkan dengan membuat suatu bangunan yang tahan gempa. Yang dimaksud dengan bangunan tahan gempa disini adalah bangunan yang tidak mengalami kerusakan pada saat terjadi gempa ringan, mengalami kerusakan non struktural yang dapat diperbaiki pada saat terjadi gempa sedang, dan tidak runtuh tetapi hanya mengalami kerusakan struktural dan non struktural pada saat terjadi gempa kuat. Dengan tidak adanya keruntuhan ini

maka diharapkan korban dapat lebih diminimalkan akibat gempa yang terjadi (Davis, 2006; 14).

Prinsip terpenting dari proyek apapun adalah bahwa proyek harus menjawab kebutuhan masyarakat yang tertimpa bencana. Prinsip ini tampaknya sederhana dan mudah diterima, tetapi banyak program dilaksanakan tanpa konsultasi dengan penduduk setempat berkaitan dengan apa saja yang menjadi kebutuhan mereka. Dalam situasi paska bencana sumber daya merupakan sesuatu yang sangat berharga, sehingga persoalan menjadi serius ketika dana dan tenaga manusia tercurah pada proyek yang tidak berhasil. Banyak proyek paska bencana menjadi berbiaya tinggi, jauh melebihi dari yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya sumber daya bagi proyek bantuan dan rehabilitasi paska bencana penting lainnya (Davis, 2006; 5).

I. 6. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yang diuraikan menjadi:

I. 6. 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penulis akan mulai mendefinisikan konsep-konsep yang sangat umum. Dalam tradisi kualitatif, peneliti menggunakan diri sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data yang ada di lapangan (Brannen, 2002; 14).

Robert C. Bogdan dan Taylor (1996) dalam British Council (2001; 27-30), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

I. 6. 2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah Tim Syallom yang merupakan kelompok misi pelayanan sosial bagian dari Yayasan Gloria Graha Yogyakarta yang memiliki pengalaman langsung dengan persoalan yang diangkat penulis, yaitu tentang program pemberdayaan masyarakat korban gempa yang menimpa masyarakat Kedung Banteng, Sengon Kerep Gunung Kidul oleh Yayasan Gloria Graha.

I. 6. 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2009; 410) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan untuk pengumpulan data untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mengerti responden lebih mendalam (Sugiyono, 2009; 411). Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau pada pengetahuan dan keyakinan pribadi (Sugiyono, 2009; 411).

b. Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung menulis segala informasi dan data serta hal-hal yang sesuai dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2009; 409). Observasi dilakukan dengan cara partisipasi aktif, di mana penulis secara langsung berpartisipasi dalam kegiatan subyek penelitian melalui kegiatan *internship* (Sugiyono, 2009; 409). Dalam hal ini perlu diikuti relasi, interaksi dan komunikasi yang intensif antara penulis dan responden untuk meminimalisir kekeliruan pandangan antara keduanya (Sugiyono, 2009; 409).

I. 7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2009; 413).

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode non statistik yaitu dengan analisis deskriptif secara kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Dalam penelitian ini akan melalui proses atau tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu metode dalam penelitian kualitatif yang mana dari semua data yang ada diringkaskan atau dikurangi data yang sesuai dengan inti tulisan. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan secara bersama-sama dengan pengumpulan data, penafsiran data dan penulisan narasi laporan sementara.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusions Drawing/Verification.*

Langkah ke tiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data dalam bentuk naratif. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data hasil wawancara dengan sejumlah informan.

I. 8. Teknik Penulisan Laporan Penelitian

Tulisan ini dirangkai menjadi empat bab. Secara umum bab-bab tersebut membicarakan pokok-pokok bahasan, sebagai berikut:

Bab pertama membicarakan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, dan metode penelitian.

Bab kedua menggambarkan tentang Tim Syallom dan Yayasan Gloria Graha dari sejarah, ruang lingkup kegiatan, serta struktur lembaga.

Bab ketiga menggambarkan tentang karakteristik Dusun Kedung Banteng Desa Sengon Kerep Kabupaten Gunung Kidul sebagai daerah penelitian, seperti kondisi lingkungan fisik, sosial, dan penduduk.

Bab keempat membicarakan pemberdayaan masyarakat oleh Tim Syallom.

Bab kelima penulis akan menjawab permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu mengenai potensi hambatan beserta pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat Kedung Banteng korban gempa bumi oleh Tim Syallom. Pada Bab ini juga akan dilakukan analisis terhadap kondisi yang dialami secara teoritis.

Bab keenam terdiri atas dua sub, yaitu kesimpulan dan saran. Penulis akan menyimpulkan secara garis besar masalah yang dialami dan memberi saran atas masalah tersebut.